

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian ini memberikan gambaran tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025 sebagai kebijakan rencana induk pengembangan pariwisata. Sasaran penelitian ini adalah Desa Wisata Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena munculnya fenomena desa wisata sebagai konsekuensi logis dari alokasi dan kewenangan anggaran di desa pasca UU Desa. Tentunya hal ini memberikan dinamika atau peluang bagi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Desa wisata Kepuharjo memprakarsai pengelolaan desa wisata sebagai hasil dari kebijakan rencana induk pengembangan pariwisata,

Pemerintah adalah badan dan lembaga pemerintah serta pejabat yang menyusun kebijakan negara atau peraturan pemerintah. Dalam menjalankan kebijakan negara terdapat beberapa aspek yang mendasari, yaitu berdasarkan/kepatuhan terhadap keputusan yang berlaku, kepentingan/kebutuhan umum dan masa depan adalah tujuan, beserta strategi atau strategi terbaik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kebijakan publik merupakan segala pekerjaan/kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah,

yang hasilnya akan membentuk suatu kegiatan simultan yang terlihat berbeda.

Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan ((Anderson J. E., 2011)). Selain itu, kebijakan publik seperti jawaban atas suatu masalah, ia akan berusaha memecahkan, mengurangi dan menahan suatu kejahatan dan lawannya dengan sebaik-baiknya dengan cara yang sebaik-baiknya dan tindakan yang terkendali.

Kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan/sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti upaya pemecahan masalah dan penggunaan fasilitas pendukung khusus, dan pada tingkat durasi tertentu. Kebijakan biasanya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menguraikan pedoman umum sebagai acuan untuk bertindak/berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan ((Ramdhani & Ramdhani, 2016)). Dalam siklus kebijakan publik terdapat tahapan implementasi, dimana implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan agar mudah dipahami/jelas tujuannya (Wahyudi et al., 2016)

Desa wisata adalah desa yang memiliki daya tarik rekreasi yang unik yaitu berupa ciri khas daerah pedesaan atau kegiatan budaya masyarakat. Potensi-potensi tersebut dikelola secara menarik melalui sarana atau prasarana penunjang pariwisata yang dapat menunjang pembangunan, dengan pengelolaan yang tertata, tertata rapi sehingga melegalkan kedatangan pengunjung ke desa wisata sehingga dapat memajukan atau

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ((Atmoko et al., 2014). Selain itu, desa wisata adalah suatu bentuk rekreasi, terdiri dari sekelompok kecil wisatawan yang tinggal di atau di desa-desa terpencil atau terpisah dari hiruk pikuk kota dan memiliki keinginan untuk belajar tentang kehidupan di desa dan lingkungan sekitarnya. ((Geogra & Gadjah, 2013)). Karena itu, ditampilkan dalam bentuk pemersatu unsur-unsur pariwisata, seperti akomodasi, fasilitas penunjang dan sebagainya ((Zakaria et al., 2014)). Dengan demikian, desa wisata adalah kawasan pedesaan/lingkungan yang menyajikan keunikan desa dari segi adat istiadat, sosial budaya, kehidupan sehari-hari, bangunan yang konservatif, dan memiliki tata ruang desa.

Desa Kepuharjo merupakan desa yang memiliki keunggulan pada kondisi geografis dan topografisnya. Selain itu, Desa Kepuharjo berpotensi menjadi desa wisata yang menjadi destinasi di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan potensi daya tarik wisata Desa Kepuharjo yaitu kesenian tradisional, tari, wisata kuliner, destinasi alam yang asri dan sejuk, serta pemandangan pegunungan yang indah dekat dengan Gunung Merapi. Adapun potensi daya tarik wisata yang dimiliki Desa Kepuharjo yaitu kesenian tradisional, wisata kuliner, alam yang asri dan sejuk seperti bukit klangon, ada perkebun strawberry, pegunungan yang indah yaitu pemandangan dari gunung merapi, wisata sejarah contohnya seperti sejarah letusan gunung merapi galeri omahku, museum mini sisa hartaku.

Dengan menggunakan teori Edward III, penelitian ini menggunakan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk menjelaskan implementasi kebijakan masterplan pengembangan pariwisata di desa wisata Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, ada 4 faktor penting dalam implementasi kebijakan publik dalam mencapai keberhasilan implementasi. Keempat dari factor tersebut ialah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi ((Irawan, 2019)).

Pertama, setiap aturan dapat diterapkan secara teratur jika ada hubungan yang efektif antara pelaksana dan pihak sasaran. Hal ini bertujuan agar tersusun secara tertib dan menangkai ketidaksempurnaan dalam rencana. Artinya, semakin ahli tingkat pendidikan pihak sasaran terhadap rencana tersebut, semakin rendah tingkat kesalahan dalam mengimplementasikan rencana tersebut di lapangan.

Kedua, sumber daya yang memadai harus mendukung setiap kebijakan, sumber daya manusia atau faktor keuangan. Sumber daya manusia adalah rasa kapasitas dan karakter yang baik dari regulator yang mencakup semua pihak yang menargetkan program/kegiatan keuangan, yaitu kematangan program/kebijakan investasi. Ketiga, pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah harus memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan karena tanpa keahlian untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan berjalan lambat dan tanpa sumber daya keuangan rencana tersebut tidak akan berhasil

mencapai target dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. mengatur, mengatur.

Ketiga, pelaksana memiliki kepribadian dan perilaku, seperti memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk tidak berbohong, dan tidak diktator atau demokratis. Jika pelaksana memiliki karakter dan keunikan yang rapi, maka dapat menjalankan aturan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pelaksana. Ketika pembuat kebijakan memiliki sikap/keinginan yang berlawanan dengan pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak berjalan dengan tertib dan tidak efektif.

Keempat, struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Lingkup penting dalam aspek struktur birokrasi adalah struktur organisasi dan prosedur. Pada aspek prosedur, penggunaan Standard Operating Procedures (SOP) mencakup kerangka kerja yang jelas, mudah dipahami dan sistematis. Oleh karena itu, implementasi program telah ditetapkan untuk menghindari mekanisme yang berbelit-belit dan tidak efektif. Dalam struktur organisasi, pemangku kepentingan harus melindungi keberadaan pengambil keputusan yang cepat jika terjadi kejadian luar biasa atau hal yang tidak terduga dalam program. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di desa Kepuharjo dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan terkait pengembangan desa wisata yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di desa wisata Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di desa wisata Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas pertanyaan penelitian yang ada, adapun maksud tujuan dari penelitian ini dilaksanakan untuk:

- a. Memperoleh gambaran dan penjelasan tentang implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata di sektor desa wisata.
- b. Menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di desa wisata Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini dilaksanakan adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu mempunyai beberapa manfaat, adapun manfaatnya untuk:

- a. Menambah dan memperkaya ilmu serta pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi/rujukan pada kajian implementasi kebijakan desa wisata untuk penelitian yang lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Penelitian bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan sebagai upaya pemecahan masalah terkait penelitian implementasi kebijakan publik khususnya mengenai kebijakan pengembangan desa wisata.

b. Manfaat Penelitian bagi Instansi Terkait

dapat memberikan masukan serta bahan pertimbangan evaluasi bagi instansi terkait baik dari perangkat kantor Kalurahan Kepuharjo, pengurus Pokdarwis sampai dengan masyarakat Kalurahan Kepuharjo untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan serta rencana perbaikan dan pengembangan desa wisata yang diberikan sehingga bisa memberikan kepuasan.

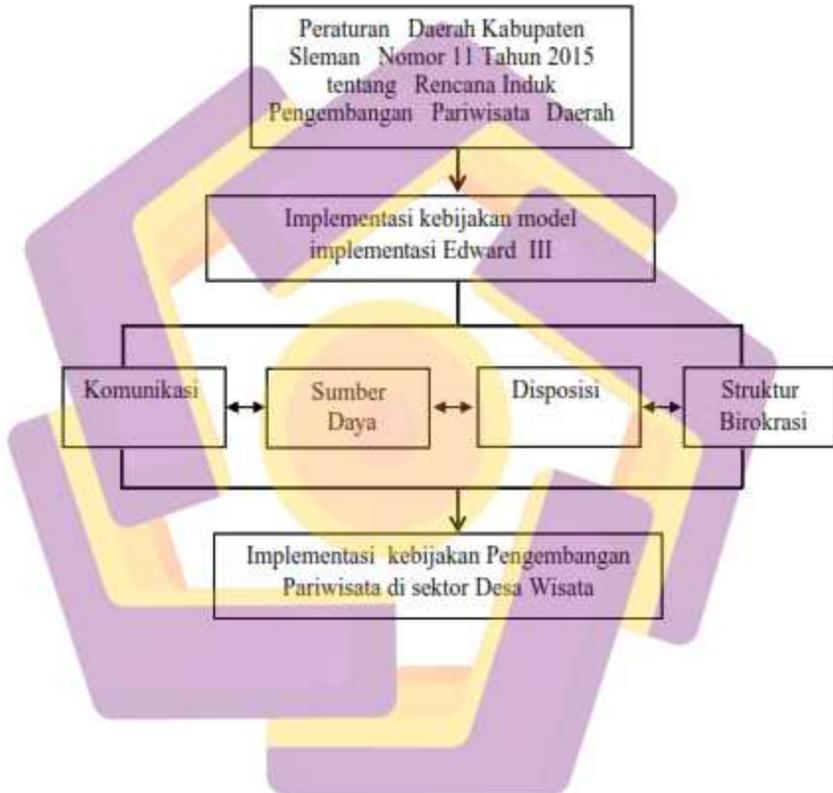
c. Bagi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk Universitas khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan terkait topik penelitian implementasi kebijakan publik mengenai kebijakan pengembangan desa wisata. Selain sebagai sumber informasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber dari referensi untuk penelitian sejenis ini di kemudian hari.

1.5 Kerangka Berpikir

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.6 State of the Art Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Kajian Penelitian | Hasil Penelitian (Kesimpulan) | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Lusita Anjelina, 2017 Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. | Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Menggunakan model teori Van Meter dan Van Horn yaitu: (1) Standar dan tujuan, (2) Sumber daya, (3) Komunikasi (4) Karakteristik dari agen pelaksana, (5) Lingkungan ekonomi, social dan politik (6) Sikap kecenderungan para pelaksana | Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat masalah dan hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan pengembangan dari Objek Wisata Pantai Tanjung Setia belum sepenuhnya optimal hal ini dipengaruhi antara lain oleh faktor dari sumber daya baik sumber daya manusia yang masih kurang maupun dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya finansialnya, serta intensitas komunikasi dari antar para agen pelaksana sehingga hal ini perlu dilakukan upaya perbaikan. | Peneliti menggunakan model teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber daya, (3) Disposisi dan, (4) Struktur birokrasi |

| No | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Kajian Penelitian | Hasil Penelitian (Kesimpulan) | Perbedaan |
|----|---|---|---|---|
| 2. | <p>Yohanes R. Juanda, Maesaroh, Amni Z. Rahman 2016</p> <p>Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif</p> <p>Teori yang pakai dalam melihat bagaimana implementasi kegiatani ppemberdayaan masyarakat di Desawisata Kandri memakai teori lima (5) ketepatan kebijakan menurut Riant Nugroho</p> <p>Teorii yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terdapat permasalahan terkait kesesuaian kegiatan yang diberikan dengan kondisi setempat; penetapan masyarakat sasaran; dan proses transformasi masyarakat lokal menjadi pengusaha di sektor pariwisata.</p> <p>Faktor kendala proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah kejelasan dan standar kebijakan, komitmen pemerintah, kondisi sosial dan ekonomi, dan disposisi pelaksana.</p> | <p>Peneliti memakai teori implementasi kebijakan menurut Edward III</p> |

| No | Nama, Tahun dan Judul Penelitian | Kajian Penelitian | Hasil Penelitian (Kesimpulan) | Perbedaan |
|----|--|---|---|--|
| 3. | <p>Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinagaa 2016</p> <p>Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara</p> | <p>Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif</p> <p>Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder</p> <p>Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Field Researchs dan Library research.</p> <p>Analisis yang akan dipergunakan penulis adalah deskriptif kualitatif</p> <p>Teori yang digunakan untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata menurut Pitana dan Gayatri yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominani sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran sebagai motivator dan dinamisator</p> | <p>Peneliti memakai teori implementasi kebijakan menurut Edward III tidak menggunakan teori terkait peran pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata</p> |

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil implementasi kebijakan serta bab yang terakhir kesimpulan dan saran. Adapun penjelasan singkat terkait kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, *State of the Art* penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan dari konsep teori yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni meliputi: implementasi kebijakan publik, desa wisata.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan terkait hasil dari pengumpulan data penelitian yang dilakukan serta analisis data diperoleh mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di desa wisata Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari paparan bab - bab sebelumnya dan pada bab ini berisi saran yang berguna untuk perbaikan pada objek penelitian untuk kedepannya.

